

perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai.

Perolehan pemilu pada tahun 1999 yang dibawah *electoral therashold* membuat masa empat tahun berikutnya digunakan PK untuk melakukan konsolidasi besar-besaran dengan memunculkan partai baru bernama “Partai Keadilan Sejahtera” (PKS) yang diharapkan membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, ketakwaan, keindahan dan kebahagiaan. Keadilan yang menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menebarkan rasa aman serta membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa takut.

⁶ Anggaran Dasar PKS pasal 5

2. Plat Form PKS

- 1) Mempelopori reformasi sistem politik, birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.
- 2) Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki keunggulan moral, keberibadian, dan intelektualitas (bersih, peduli, dan professional).
- 3) Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar menjadi proses saling mengawasi, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih stabil.
- 4) Memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien.
- 5) Strategi penegakan hukum diawali dengan membersihkan alat penegagnya dari perilaku bermasalah dan konflik, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

[illegible]

kpendudukan, kewanitaan, kemiskinan, dan sebagainya. Karenanya dibutuhkan dan harus ditumbuhkan kader-kader yang profesional dalam berbagai bidang kehidupan untuk dapat bergerak bersama masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menjalankan gerakan kultural penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan simpul-simpul kepemimpinan dan kantong-kantong kultural masyarakat, sehingga terbangun suatu barisan massa yang menerima dan mendukung nilai-nilai dakwah. Aliansi strategis yang terbangun merupakan bentuk kepercayaan atau mandat yang di berikan masyarakat kepada partai dakwah untuk selalu berjuang membela kepentingan masyarakat.

¹³ Ibid., 40.

Dengan berdialog ini, sebenarnya partai telah melatih masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Hal ini dikarenakan di dalam sistem pemerintahan demokratis meniscayakan peran serta seluruh komponen negara, baik penyelenggara negara maupun masyarakat luas sebagai pemilik kedaulatan atas negara.

Dengan dialog diharapkan dapat terjalin komunikasi yang lebih terbuka dan masif diantara partai Keadilan Sejahtera dan masyarakat basis masanya. Selain itu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait penyelenggaraan negara.

Selain pendidikan politik yang diterapkan melalui dialog yang diselenggarakan oleh bidang-bidang di dalam DPD PKS Kabupaten Sidoarjo, pihak pengurus juga turut serta mendampingi anggota dewan dari PKS saat melakukan reses di daerah pemilihan di Sidoarjo. Hal ini dimaksudkan menunjukkan komitmen partai untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat kepada penyelenggara negara baik di legislatif maupun eksekutif.

Di sisi lain, PKS mempunyai strategi lain dalam menjalankan pendidikan politiknya yakni melalui kegiatan-kegiatan formal yang dilakukan partai dan juga dengan memberlakukan jenjang pengkaderan untuk setiap kadernya. Dalam hal ini PKS tidak hanya memberikan pengetahuan terkait kesadaran berpolitik, namun juga memberikan pengalaman bagi masyarakat pada umumnya serta pada anggota khususnya terkait budaya politik serta untuk mencetak pemimpin yang tangguh.

setiap tingkatan kepengurusan di tubuh PKS. Misalnya, seorang pemula tidak dapat menjadi pengurus di tingkat DPD Kabupaten/Kota.

Dari strategi dan model pendidikan politik yang telah dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Sidoarjo, penulis menganggap ada satu diantar beberapa program yang ditemukan diatas masih belum selesai yaitu advokasi terhadap masyarakat sidoarjo mengingat advokasi yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Sidoarjo adalah salah satunya mengadvokasi masyarakat yang mengalami musibah lumpur lapindo dari segi penggantian ganti rugi sampai pada peroses penguburan masyarakat yang mempunyai kartu tanda penduduk ganda.

G. Pola Rekrutmen Kader dan Jenjang Pengkaderan di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo

Sebagaimana tuntutan di dalam Undang-Undang tentang Partai Politik, PKS menerapkan pola rekrutmen kepada masyarakat Indonesia untuk dijadikan sebagai :

1. Anggota Partai Keadilan Sejahtera
2. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

Rekrutmen ini dimaksudkan menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Maka pola rekrutmen ini diharuskan oleh Undang-Undang dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

[illegible]